

SIARAN PERS

SP - 03 /DJPB/2021

Menkeu Pastikan Akhir Tahun Anggaran 2021 Berjalan Baik

Jakarta, 31 Desember 2021 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan dialog akhir tahun melalui *video conference* dengan para pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertugas di kantor vertikal dari 6 regional. Kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi, diskusi, dan refleksi atas capaian pelaksanaan program strategis dalam APBN TA 2021 beserta hasil-hasilnya, termasuk pengaruhnya terhadap perekonomian di daerah.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkeu terutama di daerah yang telah mengawal pelaksanaan APBN dan penyehatan ekonomi kembali. Kantor vertikal juga diharapkan dapat memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam bersinergi mendorong pemulihan ekonomi nasional dari daerah," pesan Menkeu.

Total realisasi Belanja Negara dari APBN 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 telah mencapai Rp2.658,8 triliun atau 96,7% dari pagu yang sebesar Rp2.750 triliun, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.894,4 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,3 triliun. Menkeu berharap realisasi belanja negara tidak hanya didorong agar penyerapannya tinggi, tetapi juga harus dilaksanakan secara akuntabel, spending-nya berkualitas, dan harus dapat mencapai *output/outcome* yang diharapkan, yaitu untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan di hari yang sama, Menkeu juga memberikan arahan pada kegiatan Tutup Kas Tahun 2021. Menkeu menyampaikan bahwa Tantangan tahun 2021 luar biasa. Diawali optimisme akan pulih, kemudian diuji lagi dengan varian Delta dan sekarang Omicron. "Kita tetap fokus mengawal perekonomian Indonesia. Alhamdulillah di penghujung tahun kita menutup kas dengan hasil yang bagus. Pajak, bea dan cukai, dan PNBP di atas target. Belanja tetap bisa kita lakukan dengan perluasannya (untuk menangani dampak pandemi), defisit bisa di bawah 5 persen".

APBN 2021 diprioritaskan untuk penanggulangan pandemi dan dampaknya melalui program strategis Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dibagi dalam lima klaster, yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Program Prioritas, Dukungan UMKM dan Korporasi, serta Insentif Usaha. Sampai tanggal 30 Desember 2021, program PEN telah terealisasi Rp584,41 triliun atau 78,47% dari pagu.

Pada tahun 2021, penumpukan realisasi belanja yang terjadi pada akhir tahun sudah lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Kemenkeu terus mendorong perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melalui penerapan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian IKPA pada lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang mencerminkan komitmen dan *awareness* K/L untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran.

Peningkatan pemerataan realisasi belanja telah berhasil dicapai pada tahun anggaran 2021. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan. Kemenkeu telah mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian, seperti optimalisasi perencanaan, percepatan pelaksanaan program, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, peningkatan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah, serta peningkatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal.

Sementara itu di sisi pendapatan, sampai dengan 29 Desember 2021 pendapatan negara telah mencapai Rp1.963,3 triliun atau 112,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Capaian ini tentu sangat menggembirakan sekaligus menunjukkan indikasi bahwa kondisi perekonomian Indonesia telah makin

baik. Perekonomian yang berangsur pulih juga tecermin dari kenaikan PDB yang konsisten sejak Triwulan IV 2020 sampai dengan Triwulan III 2021. PDB pada Triwulan II 2021 yang tercatat sebesar Rp4.325,44 triliun juga mengalami pertumbuhan 3,51% yoy.

"Lesson learned dari pandemi ini akan mendorong agar APBN menjadi benar-benar high quality, efektif, dan akuntabel, dapat menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi, yang sesuai dengan good governance, dan transparan," sebut Menkeu.

Pada masa depan tantangan yang dihadapi pemerintah juga terus berkembang. Untuk itu berbagai risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan harus terus dimitigasi melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antar-unit Eselon I di Kemenkeu. Sinergi yang nyata ini diharapkan dapat mewujudkan APBN yang berkualitas dan *sustainable*, serta mendorong penguatan pemulihan perekonomian Indonesia.

Narahubung Media:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Website : djpb.kemenkeu.go.id Email : hai.djpb@kemenkeu.go.id

Telepon: 14090